



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 15 Juli 2022

Nomor : 641 /BP/OT.01.2/7/2022
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pelaksanaan Pengisian Kuisisioner Survei Penilaian Integritas (SPI)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2022**

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan;
6. Kepala Biro pada Badan Urusan Administrasi (terlampir)
7. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat lingkungan peradilan (terlampir);
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat lingkungan peradilan (terlampir).

Di

TEMPAT

Menindaklanjuti Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial dengan Nomor Agenda: 884 D/WKMA.NY/6/2022 tanggal 20 Juni 2022 Perihal Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pimpinan KPK Nomor B/3258.6/LIT.05/01-15/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 Hal Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022, dengan ini minta bantuannya untuk memastikan pegawai yang terpilih menjadi responden pada unit kerja saudara agar segera merespon pengisian kuisisioner survei yang akan dikirim melalui berbagai saluran komunikasi (email dan pesan whatsapp) dengan tautan kelaman kpk.go.id. Pelaksanaan SPI 2022 akan berlangsung pada bulan Juli s.d Oktober 2022 dimana KPK sebagai pelaksana akan dibantu oleh PT Marketing Sentratama Indonesia (*Frontier Group*) sebagai pihak ketiga.

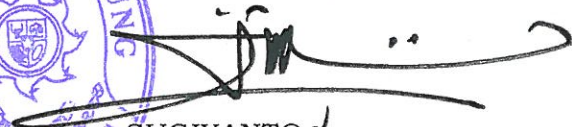
Kegiatan SPI bersifat mandatori sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/13/RB.01/2021 tentang Penyampaian Informasi Pemanfaatan Hasil Survei Penilaian Integritas KPK sebagai Nilai Hasil Survei Eksternal Persepsi Anti Korupsi dalam evaluasi RB Tingkat Lembaga dan akan berlangsung setiap tahun serta dilakukan di semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Untuk koordinasi lebih lanjut, bila ada informasi yang dibutuhkan mengenai SPI dapat menghubungi Sdr. Abu Samah (08123919770) dan Sdr. Syarifullah M. Nur (082122137785).

Demikian kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI


SUGIYANTO ✓

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Para Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Arsip.

Lampiran Surat Kepala Badan Pengawasan MA RI
Nomor : /BP/OT.01.2/7/2022
Tanggal : Juli 2022

**DAFTAR UNIT KERJA YANG MENJADI SAMPEL
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS KPK TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA**

ESELON I (PUSAT)

A. DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

1. Kesekretariatan
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bagian Umum
4. Sub Direktorat Mutasi Hakim
5. Sub Direktorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus
6. Sub Direktorat Kasasi Pidana Khusus

B. DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

1. Kesekretariatan
2. Bagian Umum
3. Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Militer
4. Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Teknis Peradilan Militer
5. Direktorat Pembinaan Administrasi Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

C. BADAN PERADILAN AGAMA

1. Bagian Kepegawaian
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
3. Bagian Umum
4. Sub Direktorat Mutasi Hakim
5. Sub Direktorat Kasasi Perdata Agama

D. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
2. Bidang Program dan Evaluasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan
3. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan
4. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

E. BADAN URUSAN ADMINISTRASI

1. Biro Kepegawaian
2. Bagian Penyusunan Rencana Anggaran
3. Bagian Perbendaharaan
4. Bagian Administrasi Jabatan Fungsional
5. Bagian Kesekretariatan Pimpinan C
6. Bagian Verifikasi Dan Tuntutan Ganti Rugi
7. Bagian Pelaksanaan Anggaran
8. Bagian Bimbingan Dan Monitoring
9. Bagian Kesekretariatan Pimpinan B
10. Bagian Urusan Dalam
11. Bagian Mutasi II

F. KEPANITERAAN

1. Panitera Muda Perkara Pidana Militer
2. Bagian Keuangan
3. Panitera Muda Kamar Pidana
4. Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara

LINGKUP PERADILAN UMUM

A. PENGADILAN TINGKAT BANDING

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Pengadilan Tinggi Medan
3. Pengadilan Tinggi Jambi
4. Pengadilan Tinggi Bengkulu
5. Pengadilan Tinggi Semarang
6. Pengadilan Tinggi Banjarmasin
7. Pengadilan Tinggi Mataram
8. Pengadilan Tinggi Ambon
9. Pengadilan Tinggi Jayapura

B. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELAS 1A KHUSUS

1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara
2. Pengadilan Negeri Bekasi
3. Pengadilan Negeri Surabaya
4. Pengadilan Negeri Sidoarjo

C. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELAS 1A

1. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
2. Pengadilan Negeri Pekanbaru
3. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
4. Pengadilan Negeri Jambi
5. Pengadilan Negeri Pati
6. Pengadilan Negeri Cilacap
7. Pengadilan Negeri Banjarmasin
8. Pengadilan Negeri Watampone
9. Pengadilan Negeri Sungguminasa
10. Pengadilan Negeri Manado
11. Pengadilan Negeri Kupang
12. Pengadilan Negeri Ambon

D. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELAS I B

1. Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pengadilan Negeri Rantau Prapat
3. Pengadilan Negeri Gunungsitoli
4. Pengadilan Negeri Stabat
5. Pengadilan Negeri Bukittinggi
6. Pengadilan Negeri Pariaman
7. Pengadilan Negeri Bangkinang
8. Pengadilan Negeri Metro
9. Pengadilan Negeri Depok
10. Pengadilan Negeri Garut
11. Pengadilan Negeri Pekalongan
12. Pengadilan Negeri Ungaran
13. Pengadilan Negeri Temanggung
14. Pengadilan Negeri Wonosobo
15. Pengadilan Negeri Purworejo
16. Pengadilan Negeri Purbalingga
17. Pengadilan Negeri Brebes
18. Pengadilan Negeri Wates
19. Pengadilan Negeri Bondowoso
20. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
21. Pengadilan Negeri Bangil
22. Pengadilan Negeri Lamongan

23. Pengadilan Negeri Singkawang
24. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
25. Pengadilan Negeri Tenggarong
26. Pengadilan Negeri Bau-Bau
27. Pengadilan Negeri Singaraja
28. Pengadilan Negeri Tabanan
29. Pengadilan Negeri Gianyar
30. Pengadilan Negeri Atambua

E. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELAS II

1. Pengadilan Negeri Biereun
2. Pengadilan Negeri Sabang
3. Pengadilan Negeri Singkil
4. Pengadilan Negeri Kutacane
5. Pengadilan Negeri Sei Rampah
6. Pengadilan Negeri Sibuhuan
7. Pengadilan Negeri Sawahlunto
8. Pengadilan Negeri Payakumbu
9. Pengadilan Negeri Solok
10. Pengadilan Negeri Lubuk Basung
11. Pengadilan Negeri Bengkalis
12. Pengadilan Negeri Rengat
13. Pengadilan Negeri Pelalawan
14. Pengadilan Negeri Ranai
15. Pengadilan Negeri Muaro Bungo
16. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
17. Pengadilan Negeri Sungai Penuh
18. Pengadilan Negeri Sengeti
19. Pengadilan Negeri Sarolangun
20. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
21. Pengadilan Negeri Kepahiang
22. Pengadilan Negeri Baturaja
23. Pengadilan Negeri Sekayu
24. Pengadilan Negeri Kotabumi
25. Pengadilan Negeri Liwa
26. Pengadilan Negeri Kota Agung
27. Pengadilan Negeri Banjarnegara
28. Pengadilan Negeri Karanganyar
29. Pengadilan Negeri Wonosari
30. Pengadilan Negeri Pasuruan
31. Pengadilan Negeri Pacitan
32. Pengadilan Negeri Trenggalek
33. Pengadilan Negeri Batu Licin
34. Pengadilan Negeri Paringin
35. Pengadilan Negeri Ketapang
36. Pengadilan Negeri Sambas
37. Pengadilan Negeri Ngabang
38. Pengadilan Negeri Tamiang Layang
39. Pengadilan Negeri Muara Teweh
40. Pengadilan Negeri Buntok
41. Pengadilan Negeri Kasongan
42. Pengadilan Negeri Pulang Pisau
43. Pengadilan Negeri Malinau
44. Pengadilan Negeri Takalar
45. Pengadilan Negeri Selayar
46. Pengadilan Negeri Pasangkayu
47. Pengadilan Negeri Belopa
48. Pengadilan Negeri Buol
49. Pengadilan Negeri Parigi
50. Pengadilan Negeri Pasarwajo
51. Pengadilan Negeri Maumere

52. Pengadilan Negeri Kefamenanu
53. Pengadilan Negeri Rote Ndao
54. Pengadilan Negeri Oelamasi
55. Pengadilan Negeri Masohi
56. Pengadilan Negeri Saumlaki
57. Pengadilan Negeri Bobong
58. Pengadilan Negeri Merauke
59. Pengadilan Negeri Wamena
60. Pengadilan Negeri Nabire
61. Pengadilan Negeri Timika

LINGKUP PERADILAN MILITER

A. PENGADILAN TINGKAT BANDING

1. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

B. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIPE A

1. Pengadilan Militer II-08 Jakarta
2. Pengadilan Militer II-10 Semarang
3. Pengadilan Militer III-16 Makassar
4. Pengadilan Militer III-19 Jayapura

C. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIPE B

1. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
2. Pengadilan Militer III-13 Madiun

LINGKUP PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. PENGADILAN TINGKAT BANDING

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

B. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIPE A

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

C. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIPE B

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

D. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIPE C

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

LINGKUP PERADILAN AGAMA

A. PENGADILAN TINGKAT BANDING

1. Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
3. Pengadilan Tinggi Agama Jambi
4. Pengadilan Tinggi Agama Pangkal Pinang
5. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
6. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
7. Pengadilan Tinggi Agama Palu
8. Pengadilan Tinggi Agama Manado

B. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELAS I A

1. Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Pengadilan Agama Tanjung Pinang
3. Pengadilan Agama Batam
4. Pengadilan Agama Jambi
5. Pengadilan Agama Tanjungkarang
6. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
7. Pengadilan Agama Kota Cimahi
8. Pengadilan Agama Garut
9. Pengadilan Agama Cibinong
10. Pengadilan Agama Kendal
11. Pengadilan Agama Kebumen
12. Pengadilan Agama Surakarta
13. Pengadilan Agama Slawi
14. Pengadilan Agama Sleman
15. Pengadilan Agama Kota Malang
16. Pengadilan Agama Banyuwangi
17. Pengadilan Agama Lamongan
18. Pengadilan Agama Blitar
19. Pengadilan Agama Palangkaraya
20. Pengadilan Agama Manado
21. Pengadilan Agama Denpasar
22. Pengadilan Agama Ambon
23. Pengadilan Agama Ternate

C. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELAS I B

1. Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe
2. Mahkamah Syar'iyah Biereun
3. Pengadilan Agama Lubuk Pakam
4. Pengadilan Agama Kisaran
5. Pengadilan Agama Bangkinang
6. Pengadilan Agama Rengat
7. Pengadilan Agama Dumai
8. Pengadilan Agama Bangko
9. Pengadilan Agama Sungailiat
10. Pengadilan Agama Curup
11. Pengadilan Agama Gunung Sugih
12. Pengadilan Agama Cibadak
13. Pengadilan Agama Salatiga
14. Pengadilan Agama Karanganyar
15. Pengadilan Agama Kajen
16. Pengadilan Agama Ambarawa
17. Pengadilan Agama Gresik
18. Pengadilan Agama Bondowoso
19. Pengadilan Agama Nganjuk
20. Pengadilan Agama Pacitan
21. Pengadilan Agama Sampang
22. Pengadilan Agama Kraksaan

23. Pengadilan Agama Pamekasan
24. Pengadilan Agama Amuntai
25. Pengadilan Agama Martapura
26. Pengadilan Agama Tanjung Selor
27. Pengadilan Agama Sungguminasa
28. Pengadilan Agama Donggala
29. Pengadilan Agama Limboto
30. Pengadilan Agama Praya

D. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELAS II

1. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
2. Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon
3. Mahkamah Syar'iyah Idi
4. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
5. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
6. Pengadilan Agama Kabanjahe
7. Pengadilan Agama Tanjung Balai
8. Pengadilan Agama Pematang Siantar
9. Pengadilan Agama Simalungun
10. Pengadilan Agama Pandan
11. Pengadilan Agama Tarutung
12. Pengadilan Agama Solok
13. Pengadilan Agama Maninjau
14. Pengadilan Agama Kabupaten 50 Kota Di Tanjung Pati
15. Pengadilan Agama Bengkalis
16. Pengadilan Agama Pasir Pangarayan
17. Pengadilan Agama Terempa
18. Pengadilan Agama Natuna
19. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
20. Pengadilan Agama Muara Tebo
21. Pengadilan Agama Sekayu
22. Pengadilan Agama Pangkalan Balai
23. Pengadilan Agama Bintuhan
24. Pengadilan Agama Krui
25. Pengadilan Agama Kota Bumi
26. Pengadilan Agama Gedong Tataan
27. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
28. Pengadilan Agama Rangkasbitung
29. Pengadilan Agama Cilegon
30. Pengadilan Agama Kota Baru
31. Pengadilan Agama Rantau
32. Pengadilan Agama Banjar Baru
33. Pengadilan Agama Batu Licin
34. Pengadilan Agama Kuala Kapuas
35. Pengadilan Agama Nanga Bulik
36. Pengadilan Agama Sukamara
37. Pengadilan Agama Tamiyang Layang
38. Pengadilan Agama Bontang
39. Pengadilan Agama Nunukan
40. Pengadilan Agama Sendawar
41. Pengadilan Agama Sinjai
42. Pengadilan Agama Bantaeng
43. Pengadilan Agama Masamba
44. Pengadilan Agama Pasangkayu
45. Pengadilan Agama Bungku
46. Pengadilan Agama Parigi
47. Pengadilan Agama Bau-Bau
48. Pengadilan Agama Muna/ Raha
49. Pengadilan Agama Andoolo
50. Pengadilan Agama Wangi Wangi

51. Pengadilan Agama Lasusua
52. Pengadilan Agama Tondano
53. Pengadilan Agama Boroko
54. Pengadilan Agama Kwandang
55. Pengadilan Agama Giri Menang
56. Pengadilan Agama Atambua
57. Pengadilan Agama Maumere
58. Pengadilan Agama Waingapu
59. Pengadilan Agama Labuan Bajo
60. Pengadilan Agama Soa Sio
61. Pengadilan Agama Mimika
62. Pengadilan Agama Kaimana